

## PEMBAURAN YANG TAK PERNAH SELESAI

---

Rochmawati<sup>1</sup>

### Abstract

*Ethnic cohesion in the Indonesian context is still problematic. Religions, political, and legal approaches could be utilised to achieve that cohesion. However, democratic and just society could only be achieved if there is political will to establish egalitarian society through applying equality before law among all ethnic groups.*

### Pendahuluan

Masalah pembauran, khususnya etnis Cina<sup>2</sup> dengan berbagai etnis lain di Indonesia, sebenarnya sudah seringkali dibicarakan di Indonesia, tetapi persoalan ini tidak pernah selesai. Selama ini sudah banyak pemikiran dan perdebatan yang muncul mengenai persoalan pembauran, baik melalui seminar-seminar, diskusi-diskusi, media cetak maupun elektronik. Bahkan para pakar dibidangnya sudah berulang kali membahasnya dari sudut pandang masing-masing, tapi tetap saja belum ada tanda-tanda yang mengarah pada penyelesaian secara optimal<sup>3</sup>.

Harus diakui bahwa selama ini ada kesan bahwa masih ada sikap tidak senang dan diskriminatif terhadap etnis Cina di Indonesia. Selain hal itu, juga ada kecenderungan untuk mempertahankan pengkotakan masyarakat atas pribumi di satu pihak, dan non pribumi di lain pihak. Begitu juga dalam dunia politik, masyarakat keturunan Cina seperti halnya kurang mendapat tempat jika dibandingkan dengan

---

<sup>1</sup> Peneliti pada Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI

<sup>2</sup> Tulisan ini tidak membedakan istilah 'Cina' dan 'Tionghoa', meskipun kecenderungan penyebutan pasca Orde Baru lebih pada 'Tionghoa' daripada 'Cina' Arief Budiman misalnya, mengatakan bahwa tidak ada perbedaan prinsipil antara penyebutan 'Cina' dan 'Tionghoa' (Budiman, 1999).

<sup>3</sup> Pembahasan hal ini dikemukakan oleh Charles A. Coppel (1994), Hasan Widjaja (1997), Tarmizi Taher (1997) dan Leo Suryadinata (2002)

masyarakat Indonesia dari etnis lainnya. Sementara itu pada saat yang sama kita ketahui bahwa masyarakat keturunan Cina justru sangat unggul dan dominan dalam bidang perekonomian, sehingga seringkali mereka menjadi sasaran kecemburuan sosial. Seperti terlihat dalam kerusuhan Mei 1998, masyarakat keturunan Cina menjadi sasaran empuk *kegarangan* masyarakat kita tanpa melihat secara obyektif apa yang sedang terjadi dan menjadi latar belakang peristiwa itu. Setiap ada kejadian atau gejolak sosial terjadi di Indonesia, masyarakat keturunan Cina hampir selalu menjadi sasaran utama kemarahan massa.

Era reformasi dan keterbukaan sekarang ini mestinya bisa menjadi momentum untuk membina hubungan dan kerja sama yang harmonis di antara berbagai etnis di Indonesia, termasuk etnis keturunan Cina. Perbenturan etnis seperti terlihat selama ini jelas tidak menguntungkan siapa pun. Sebaliknya, perbenturan etnis hampir selalu merugikan semua pihak karena berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial ekonomi maupun integrasi nasional.

Dalam kaitan itu, tulisan ini akan mencoba melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat proses pembauran di Indonesia.

### **Stereotip Etnis Cina**

Sesungguhnya masyarakat keturunan Cina atau etnis Cina ini sudah membaur, dan telah berlangsung cukup lama di berbagai daerah. Hal ini bisa dilihat pada etnis Cina yang berada di berbagai daerah dan perkampungan-perkampungan yang multietnis, seperti melalui perkawinan campur dan perpindahan agama dari agama asli. Sebagai contoh, sebagian masyarakat etnis Cina yang pindah agama dengan memeluk agama misalnya, Islam<sup>4</sup>. Tetapi di pihak lain harus diakui pula masih ada sebagian masyarakat etnis Cina yang nampaknya tidak mau membaur, eksklusif dan hanya bergaul dengan para penguasa.

---

<sup>4</sup> Sejauh ini tidak ada data tentang jumlah kalangan etnis Cina yang masuk Islam, namun sebagian di antara mereka kemudian membentuk organisasi Yayasan Ukhuwah Islamiyah yang dipimpin oleh Junus Jahja, seorang Cina Islam yang juga aktif di BAKOM-PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa). Menurut Coppel, populasi etnis Cina yang masuk Islam relatif lebih sedikit dibandingkan mereka yang pindah ke agama Kristen (Katolik dan Protestan) (Coppel, 1994: 307 dan 36)

Kalau melihat keadaan etnis Cina seperti itu maka etnis Cina ini sesungguhnya merupakan kelompok masyarakat yang heterogen dimana masing-masing mempunyai orientasi budaya yang berbeda. Jika dilihat dari asal usul sejarah kedatangannya, etnis Cina dapat dibagi dua golongan, yaitu Cina “peranakan” dan Cina *totok* (Suryadinata, 2002:17-18). Cina “peranakan” adalah masyarakat keturunan Cina yang sudah lama – dalam hitungan beberapa generasi – tinggal dan mencari nafkah di Indonesia dan sudah mengalamipembauran dengan masyarakat di lingkungannya. Dari segi bahasa juga mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, atau bahkan bahasa daerah mereka tinggal, sebagai bahasa sehari-hari, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Mereka pada umumnya juga bertingkah laku seperti kelompok etnis lainnya, begitu juga dengan budayanya sudah berorientasi pada kebudayaan Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan Cina *totok* adalah mereka yang pada umumnya baru masuk atau datang ke Indonesia satu atau dua generasi. Biasanya mereka disebut juga dengan sebutan *singke* yang artinya tamu. Mereka pada umumnya masih menganut kebudayaan dan adat istiadat Cina, dan untuk berkomunikasi diantara sesamanya masih menggunakan bahasa asal mereka, dalam hal ini tentu saja bahasa Cina. Dilihat dari adanya penggolongan masyarakat etnis Cina menjadi dua golongan (Cina *totok* dan peranakan Cina) tersebut, maka etnis Cina yang ada di Indonesia sebenarnya adalah sebuah kelompok minoritas yang heterogen (Suryadinata, *ibid*).

Di sisi lain, etnis Cina seringkali dianggap sebagai suatu kelompok yang eksklusif, dan cenderung dinilai negatif oleh masyarakat di sekitarnya. Stereotip negatif ini telah berkembang lama bahkan sejak zaman kolonial Belanda, sehingga dalam hubungan antara etnis Cina dengan masyarakat Indonesia acapkali muncul berbagai bentuk prasangka. Hal ini tampaknya bersumber pada perlakuan istimewa oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap etnis Cina tersebut. Warisan seperti ini masih melekat di masa kemerdekaan. Stereotip etnis Cina itu misalnya disampaikan oleh Coppel (1994 : 26) sebagai berikut :

“Orang Tionghoa itu suka berkelompok-kelompok, mereka menjauhkan diri dari pergaulan sosial dan lebih suka tinggal di kawasan tersendiri. Mereka selalu berpegang teguh pada kebudayaan negeri leluhur mereka. Kesetiaan mereka kepada Indonesia dalam keadaan paling meragukan, dalam keadaan paling buruk bersikap memusuhi Indonesia. Orang Tionghoa

yang nampaknya berpihak kepada Indonesia nampaknya kurang bersungguh-sungguh hati, mereka hanya berpura-pura melakukan itu untuk alasan oportunis daripada perasaan yang sebenarnya untuk memihak kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Oportunisme semacam ini adalah ciri khas dari orang yang hanya mementingkan uang, perdagangan dan bisnis. Mereka ini tidak seperti orang Indonesia yang memiliki pengabdian kepada cita-cita. Setelah diberikan kedudukan yang menguntungkan oleh Belanda, orang Tionghoa mendominasi perekonomian Indonesia, melakukan penindasan terhadap rakyat Indonesia dan menghalangi-halangi kebangkitan golongan pengusaha pribumi. Masih tidak puas dengan kedudukan mereka yang dominan itu, mereka pun terlibat dalam subversi ekonomi, karena mereka ahli dalam bidang penyogokan dan penyelundupan”.

Stereotip etnis Cina seperti itu yang sudah muncul sejak jaman kolonial dan masih melekat sampai sekarang, jelas merupakan suatu stereotip yang negatif. Stereotip tersebut pada akhirnya melembagakan prasangka negatif masyarakat Indonesia pada etnis Cina yang berdampak pada masih rapuhnya hubungan sosial yang terjalin. Akibatnya selalu terbuka peluang untuk kembali terpicunya berbagai aksi kerusuhan anti-Cina di Tanah Air.

Memang sulit untuk melepaskan prasangka negatif terhadap etnis Cina ini, karena begitu kuatnya hubungan antara etnis Cina dengan pemerintahan kolonial Belanda yang mendudukan kelompok etnis Cina sebagai warga negara peringkat kedua sesudah masyarakat keturunan Eropa. Sementara itu masyarakat Indonesia sendiri posisinya berada di bawah etnis Cina, yaitu pada posisi ketiga. Perlakuan istimewa semacam itu jelas membentuk persepsi diri di kalangan etnis Cina, bahwa kedudukan sosial mereka berada di atas masyarakat Indonesia dari berbagai etnis lainnya. Perlakuan istimewa demikian telah dimanfaatkan oleh sebagian etnis Cina untuk mendekati para penguasa pada masa kolonial maupun penguasa pribumi dengan segala cara, yang menurut mereka dihalalkan. Bagi mereka yang terpenting adalah apapun yang diinginkan atau dicita-citakan bisa tercapai, walaupun harus dilakukan melalui penyogokan dan penyelundupan.

Terlebih lagi pada masa Orde Baru, tampak sekali perlakuan para penguasa pada saat itu, yang cenderung “memanjakan” etnis Cina. Memang tidak semua etnis Cina ini dimanjakan, karena dalam kenyataannya hanya segelintir atau sebagian dari mereka yang

mendapat perlakuan istimewa. Berbagai bentuk pemanjaan itu diantaranya adalah kemudahan bernegosiasi dalam dunia bisnis, serta mendapat kemudahan dalam memperoleh fasilitas lainnya dalam kehidupan ekonomi. Kuatnya prasangka masyarakat Indonesia terhadap etnis Cina ini tidak terlepas dari warisan masa lalu (pemerintah Hindia Belanda), yang sepertinya sudah disosialisasikan dan diinternalisasikan menjadi suatu keyakinan, bahwa warisan masa lalu itu tidak dapat dihindarkan.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencari pemecahan ke arah pembauran total dengan masyarakat Indonesia, tapi stereotip itu masih berkembang kuat dalam masyarakat. Selama masa Orde Baru, di kalangan masyarakat keturunan Cina sendiri sebenarnya telah berkembang dua pemikiran yang saling bertentangan mengenai upaya pembauran ini. Pertama, adalah paham integrasi, yang intinya mencita-citakan agar keturunan etnis Cina di Indonesia diakui sebagai salah satu etnis sama seperti etnis-etnis lain yang ada di Indonesia. Kedua, adalah pemikiran yang menghendaki adanya asimilasi yang pada dasarnya menganjurkan agar keturunan Cina di Indonesia membaur dan mencairkan diri dengan masyarakat setempat.

Dalam rangka pembauran, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan peraturan, yaitu berupa Keputusan Presidium Kabinet No. 1227/U/Kep/12/1966 mengenai pergantian nama warga keturunan Cina di Indonesia. Melalui peraturan tersebut, pemerintah menganjurkan agar keturunan Cina bersedia mengganti nama asli mereka dengan nama khas Indonesia, dan untuk mendukungnya maka proses perubahan atau penggantian nama itu dipermudah oleh pemerintah. Sesudah itu pemerintah kemudian mengeluarkan lagi Peraturan Presiden No. 14/1967 yang mengatur agama, kepercayaan, dan adat istiadat keturunan Cina. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa tanpa mengurangi kebebasan semua WNI untuk melaksanakan ritus keagamaan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, tata cara ibadah keturunan Cina harus dilakukan secara interen, dan dalam batas-batas keluarga keturunan Cina saja. Setelah itu keluar lagi keputusan Presiden No. 240/1967 mengenai kebijaksanaan pokok yang menyangkut WNI keturunan asing. Dikatakan bahwa kedudukan mereka, hak dan kewajiban mereka di depan hukum sama dengan bangsa Indonesia lainnya (Taher, 1997).

Dari uraian di atas tampak bahwa ada upaya untuk mempermudah proses pembauran, walaupun dalam kenyataannya ada hal-hal yang nampaknya masih sulit untuk dilaksanakan. Meskipun demikian, anjuran pemerintah untuk penggantian nama pada umumnya dipatuhi. Hampir semua etnis Cina memiliki nama Indonesia. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan ritual keagamaan, yang diharuskan dilakukan di lingkungan mereka sendiri, juga cenderung dipatuhi oleh warga keturunan Cina. Akan tetapi, masih ada sebagian dari etnis Cina yang terkesan eksklusif, dan tidak mau membaur dengan lingkungannya. Jika ditanyakan kepada mereka, jawabannya seperti klise, yaitu karena kesibukan serta rutinitas yang begitu padat. Padahal kalau diperhatikan ini merupakan salah satu ciri stereotip etnis Cina, yaitu mereka suka hidup berkelompok, menjauhkan diri dari pergaulan sosial lingkungannya dan tanpa mereka sadari hal itu terus berlanjut hingga kini. Karena itu dalam hal ini pemerintah harus terus melakukan pendekatan kepada etnis Cina, dan tak segan-segan untuk mengajak dan menghimbau agar mereka mau membaur dengan lingkungannya. Sesibuk apapun mereka bekerja, tentu harus bisa meluangkan waktunya untuk membaur dengan masyarakat sekitarnya.

### **Belum Selesai Pembauran**

Etnis Cina sebenarnya merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang sedang dalam proses pembauran menuju ke dalam penyatuan dengan etnis lainnya. Sebenarnya tujuan dari proses pembauran ini tidak lain adalah untuk menjadi orang Indonesia, dan mempunyai kebudayaan Indonesia. Untuk itu etnis Cina, mau tidak mau harus berusaha meninggalkan ciri – ciri dan budayanya, supaya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia secara utuh.

Dalam proses pembauran ini yang ingin dicapai adalah keserasian dalam sikap dan perilaku, terutama bagi warga negara keturunan asing yang ingin menyatu dengan penduduk asli. Konsekuensi logis dari pembauran adalah bahwa pendatang secara otomatis harus meninggalkan keasingannya, sehingga bukan lagi sebagai tamu yang menumpang mencari nafkah saja. Oleh karena itu komitmen pada pembauran berarti bersedia bergaul dengan golongan masyarakat yang berbeda latar belakang budayanya. Selain itu, dalam proses pembauran itu para pendatang harus bisa mengembangkan solidaritas sosial yang merealisasi pemaduan sikap dan perilaku serta

menyelaraskan diri dengan lingkungan di mana pun mereka berada. Begitu juga dalam hal tempat tinggal, tidak lagi mengelompok sesama golongan sendiri saja, tapi sebaliknya harus berusaha mengakrabkan diri, menjalin hubungan dengan masyarakat setempat, sehingga memungkinkan berkembangnya aspirasi diri yang menyatu pada kehidupan masyarakat dalam pengertian yang sangat luas.

Hampir bisa dipastikan bahwa ini bukanlah hal yang mudah untuk segera diwujudkan mengingat etnis Cina merupakan golongan yang mempunyai rasa lebih superior, sehingga agak sungkan untuk berusaha mendekati golongan lainnya. Selain itu, di antara mereka juga ada asumsi bahwa pembauran dengan masyarakat asli dapat dianggap menurunkan martabatnya. Apalagi berdasarkan sejarahnya mereka selalu mendapat kedudukan yang lebih tinggi jika dibandingkan masyarakat Indonesia, sehingga cenderung menganggap orang Indonesia mempunyai kedudukan sosial yang lebih rendah.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pemerintah, sejak masa Orde Baru hingga sekarang sudah banyak mengupayakan agar pembauran di kalangan etnis Cina ini segera tuntas. Meskipun demikian hasilnya belum optimal. Bahkan di masa yang akan datang pun tampaknya bangsa Indonesia akan selalu dihantui oleh masalah pembaruan ini. Berkaitan dengan itu, beberapa pakar, sebagaimana dikemukakan oleh Tarmizi Taher (1997), menyebutkan adanya beberapa faktor penyebab belum tuntasnya masalah pembauran.

Faktor pertama, adalah faktor historis, khususnya berkaitan dengan politik pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan keturunan Cina khususnya. Dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda mengkategorikan penduduk Indonesia ke dalam tiga kelompok, yaitu orang-orang Eropa sebagai golongan yang kedudukannya paling tinggi, golongan Timur Asing yang terdiri dari etnis Cina, India dan Arab, yang kedudukannya di bawah orang Eropa, dan golongan pribumi yang menduduki posisi sosial terendah.

Faktor kedua, juga masih bersifat historis, tetapi hal ini lebih berkaitan dengan konteks sosial dan ekonomi. Hak-hak itu di antaranya adalah diperbolehkannya memonopoli penjualan candu, begitu pula posisi sebagai perantara jual beli antara pemerintah Hindia Belanda dengan masyarakat pribumi pada saat itu. Kalau melihat kepada perlakuan istimewa dari pemerintah Hindia Belanda yang berakibat

hingga sekarang maka tidak mengherankan lagi kalau etnis Cina selalu diidentikan dengan para penguasa.

Faktor ketiga, adalah bahwa keturunan Cina diberi hak-hak istimewa oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebagai akibat perlakuan istimewa dari pemerintah Hindia Belanda tersebut telah terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat jelas antara etnis Cina dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pada era kolonial Belanda, kesenjangan ekonomi itu tercermin dari perbedaan tingkat pendapatan antara golongan Eropa, Timur Asing (terutama Tionghoa) dan pribumi, di mana pribumi rata-rata berpenghasilan 23,54 persen, sedangkan rata-rata pendapatan etnis Cina atau Tionghoa sekitar 63,80 persen<sup>5</sup>.

Kesenjangan ini berdampak pada munculnya kecemburuan sosial masyarakat Indonesia terhadap masyarakat keturunan Cina. Selanjutnya kecemburuan itu melahirkan rasa curiga dan kebencian yang sangat mendalam, sementara itu pada saat yang sama para etnis Cina masih terus mencari perlindungan dari para penguasa. Secara kasat mata kesenjangan ekonomi di antara etnis Cina dengan masyarakat Indonesia memang tampak cukup mencolok. Akan tetapi kalau dilihat kepada sejarahnya etnis Cina memang sudah sejak lama berkecimpung dalam dunia perdagangan sehingga keberhasilan mereka dalam dunia bisnis dan perdagangan sebenarnya tidaklah begitu mengherankan.

Faktor keempat, adalah faktor kultural, yang tampaknya lebih relevan jika diletakkan dalam konteks adat istiadat yang masih dipertahankan masyarakat keturunan Cina totok. Kebudayaan Cina adalah salah satu kebudayaan yang usianya tertua di dunia. Salah satu kebanggaan etnis Cina adalah tumbuh berkembang di suatu tempat, menyebar dan memberikan pengaruh kebudayaan Cina di tempat itu. Karena faktor tradisional ini, etnis Cina yang memiliki kecenderungan *chauvinistik*, yaitu sering memandang rendah kebudayaan dan adat istiadat bangsa-bangsa lain.

Faktor kelima adalah konsep kebangsaan di Indonesia yang cenderung didasarkan kepada ras. Dengan demikian, sangat sukar bagi minoritas keturunan Cina untuk dapat diasimilasikan dengan arus besar kelompok mayoritas. Berhadapan dengan konsep kebangsaan seperti

---

<sup>5</sup> Presiden BJ Habibie pernah menyebut bahwa 3 (tiga) persen orang Cina menguasai 90 persen ekonomi Indonesia, namun Leo Suryadinata meragukan kebenaran data ini (2002 : 57-59).

ini, maka keturunan Cina yang sebenarnya sudah siap untuk berintegrasi ke dalam masyarakat lokal justru akan kembali mempererat jaringannya dengan kelompok *Huaqiao* (Cina perantauan).

Faktor keenam, sebagaimana dikemukakan Tarmizi Taher (1997) adalah posisi Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Berkaitan dengan itu pemerintah sering menyerukan kepada etnis Cina untuk berubah agama, walaupun di antara para etnis Cina ada yang mau berpindah agama, namun secara umum program ini tampaknya gagal. Menurut Yusuf Yahya, kurang berhasilnya program tersebut sebagai akibat dari masih bertahannya citra buruk mengenai agama Islam di kalangan masyarakat keturunan Cina. Agama Islam dipandang identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan sifat-sifat buruk lainnya. Ajaran Islam juga selalu digambarkan sebagai ajaran yang terlalu keras, sehingga sulit untuk diadaptasi (Coppel, 1994 :35).

Mengenai faktor posisi Islam sebagai agama mayoritas ini, Coppel (*ibid*) mencatat bahwa terdapat berbagai alasan kalangan etnis Cina berkaitan dengan keengganan mereka berakulturasi secara luas. Sebagai contoh dikemukakan:

...perubahan masuk agama Islam katanya menuntut pengorbanan fisik tertentu bagi seorang penduduk Tionghoa, seperti penyunatan dan makan daging babi, suatu jenis bahan makanan yang disukai orang Tionghoa. Lebih jauh dikatakan bahwa sifat relatif kurang toleran dan eksklusifnya agama Islam (dibandingkan dengan toleransi dan sifat serba membolehkan dari agama Budha aliran Theravada di Muangthai) telah menjadi penghalang bagi perubahan keyakinan orang Tionghoa, yang dikatakan mempunyai temperamen keagamaan yang lebih bersifat 'suka memilih-milih dan sinkretis daripada eksklusif'

Melihat pemaparan para pakar yang diuraikan kembali oleh Tarmizi Taher seperti dikemukakan sebelumnya, jelas sekali bahwa salah satu faktor penyebab belum tuntasnya pembauran di Indonesia adalah akibat kuatnya pengaruh pemerintah Hindia Belanda dalam mendudukan posisi etnis Cina menjadi warga negara peringkat kedua.

Usaha pemerintah untuk melaksanakan pembauran sebenarnya sudah cukup maksimal, dengan melakukan segala cara. Namun upaya yang melibatkan para tokoh, baik dari golongan etnis Cina maupun

tokoh masyarakat Indonesia, tampaknya belum mendapatkan hasil optimal. Hal itu karena, jika dilihat dari segi kultural, politis dan ekonomi etnis Cina yang ada di Indonesia bukanlah masyarakat minoritas yang homogen melainkan merupakan masyarakat minoritas yang heterogen. Selain itu faktor historis, kultural, politik dan ekonomis yang merupakan warisan yang ada sejak jaman kolonial Belanda hingga sekarang, tampaknya masih menjadi penghalang untuk kelangsungan proses pembauran. Kegagalan tersebut semakin bertambah karena ternyata selama masa Orde Baru pemerintah telah mengambil kebijaksanaan yang bersifat asimilasi ketimbang kebijaksanaan yang bersifat intregal.

### **Berbagai Solusi Masalah Pembauran**

Masalah pembauran di Indonesia tampaknya sangat kompleks, sehingga tidak kunjung ada penyelesaian secara menyeluruh. Namun kompleksitas persoalan pembauran juga ada dampak positifnya, yakni munculnya berbagai tawaran konsep dan pemikiran untuk mencari jalan keluar pemecahannya.

Menurut beberapa sumber, untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar dari masalah pembauran di Indonesia adalah melalui proses asimilasi. Pembauran akan berjalan dengan lancar jika unsur persamaan identitas dengan kelompok mayoritas, seperti nama dan panggilan untuk seorang anggota etnis Cina diganti menjadi nama Indonesia. Nama-nama yang dipakai bisa diambil dari nama-nama yang lazim yang dipergunakan oleh pemeluk agama Islam, yang biasa dipakai oleh umat Kristen, atau nama-nama yang berbau asing tergantung kepada individu atau etnis Cina yang bersangkutan. Perubahan nama itu bisa dilihat misalnya pada mereka yang berpindah agama dan masuk agama Islam serta menggunakan nama Islam, begitu juga dengan mereka yang memeluk agama lainnya.

Selain melalui proses asimilasi, pemikiran yang kedua adalah melalui agama. Berkaitan dengan ini sebenarnya Cina muslim bukanlah merupakan hal baru, sebab sejak abad ke 15, mereka bahkan pernah membangun sebuah pusat pemerintahan Islam yang pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Demak. Menurut sejarawan Prof. Slamet Mulyana dalam bukunya *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara*, sebagaimana dikutip

oleh Abdul Baqir Zein (2000:39), para pendiri kesultanan Demak terdiri dari Djien Soen (Adipati Yunus, Pati Unus), Sultan Trenggana (Toeng Kha Lho), dan Sultan Prawoto (Moek Ming), yaitu para musafir muslim yang bermazhab Hanafi, yang satu generasi dengan Laksamana Sam Po Khong alias Tjeng Hoo, yang terdampar dan mendirikan sebuah mesjid di Semarang.

Dengan demikian hubungan antara etnis Cina dan Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Peradaban Cina bahkan sudah dikenal sejak jaman Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak mengherankan jika hubungan ini tercermin dalam sebuah hadits yang sangat terkenal yaitu “Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina”. Pada waktu itu kaum muslimin di negeri Cina sendiri kurang lebih berjumlah sekitar 100 juta orang. Oleh karena itu dengan melihat banyaknya jumlah etnis Cina yang sudah menjadi kaum muslimin, sebenarnya tidak begitu sulit bagi mereka dalam melakukan pembauran di Indonesia.

Semakin banyaknya etnis Cina memeluk agama Islam pada mulanya dianggap sebagai salah satu usaha untuk mencapai proses asimilasi. Namun akhir-akhir ini muncul penafsiran baru yang pengertiannya semakin luas, yaitu bahwa gejala itu bukan hanya proses asimilasi tapi juga pembauran. Seiring dengan itu sebagian etnis Cina mempunyai keyakinan bahwa berpindah agama merupakan panggilan iman. Maka dengan mereka berkeyakinan seperti itu, diharapkan bahwa jurang antara pribumi dan non pribumi akan hilang, dan mereka benar-benar mau membaur serta secara perlahan-lahan dapat menghilangkan identitas dirinya sebagai orang Cina dan menjadi “orang Indonesia”. Hal tersebut juga diungkapkan oleh C.A. Coppel dalam bukunya *Tionghoa Indonesia dalam Krisis* (1994) yang mengatakan bahwa, “Bila peranakan Cina berbaur, merasuk ke dalam agama kaum pribumi mayoritas maka proses pembauran itu berlangsung lebih cepat, sementara citra sebagai ‘Cina’ otomatis lenyap. Mereka langsung menjadi ‘Indonesia’. Dengan memeluk Islam, peranakan Cina “akan mendapat penerimaan yang hangat”.

Selain melalui jalur agama, solusi bagi masalah pembauran juga bisa ditempuh melalui pendekatan partai politik. Sejalan dengan situasi politik di Indonesia yang sekarang ini sedang bersemangat dengan reformasinya, maka bermunculan partai-partai politik dari segala macam lapisan termasuk dari kalangan minoritas etnis Cina.

Sekelompok kaum muda dari kalangan etnis Cina mendirikan Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (Parti) yang berdiri pada tahun 1998. Tujuan berdirinya partai ini adalah memberikan wawasan kebangsaan yang lebih luas kepada etnis Cina atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan yang menjadi latar belakang berdirinya partai politik ini tidak lain adalah mencermati situasi dan kejadian dalam beberapa tahun terakhir, yang memperlihatkan bahwa hubungan masyarakat Indonesia dengan etnis Cina ini tidak harmonis.

Peristiwa kerusuhan pada bulan Mei tahun 1998 di mana etnis Cina telah menjadi sasaran keganasan, ketidakpuasan, dan kecemburuan sosial, mungkin bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Kini, melalui era keterbukaan dan reformasi, etnis Cina bisa memperjuangkan hak-haknya melalui berbagai partai politik dan organisasi kepentingan yang tumbuh subur pasca-Orde Baru. Seperti diketahui, kesempatan untuk berpolitik itu tidak diberikan selama masa Orde Baru, sehingga etnis keturunan Cina mendominasi bidang ekonomi. Peluang berpolitik bagi etnis Cina ini tampaknya bisa menjadi salah satu faktor yang mempercepat proses pembauran, karena mereka diberi hak yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya.

### **Kesimpulan**

Walaupun banyak cara yang bisa ditempuh untuk mencari solusi masalah pembauran, yaitu melalui proses asimilasi, melalui pendekatan agama, dan pendekatan politik, namun upaya itu tidak akan tercapai apabila tidak dilakukan pendekatan yang bersifat menyeluruh yang merupakan gabungan dari ketiganya. Dengan kata lain suatu integrasi total tampaknya harus dilakukan oleh warga negara keturunan Cina. Mereka harus sungguh – sungguh menyatu dan meleburkan dirinya dengan seluruh lapisan masyarakat setempat di mana mereka berada, sehingga tidak ada lagi jurang pemisah antara warga etnis Cina dengan masyarakat Indonesia lainnya. Sebagai contoh, seorang etnis Cina yang dilahirkan di suatu daerah dan mencari penghidupan di daerah tersebut, maka ia harus menyatu dengan masyarakat dan adat-istiadat setempat. Mungkin melalui integrasi total seperti itu, proses pencarian pemecahan terhadap masalah pembauran dapat segera diakhiri, dan warga keturunan Cina bisa benar-benar menyatu serta hidup secara damai di Indonesia.

Sementara itu di bidang hukum, berbagai peraturan dan juga perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap warga etnis Cina mestinya dicabut dan dihilangkan pula sebagai perwujudan pengakuan adanya persamaan kedudukan di depan hukum seperti warga negara Indonesia yang berasal dari etnis lain. Apalagi jelas bahwa persamaan kedudukan semua warga negara di depan hukum dan politik telah dijamin oleh konstitusi negara hasil perubahan terhadap UUD 1945.

Selain itu, suatu Indonesia baru yang adil, demokratis, pluralis, dan damai tak akan pernah terwujud apabila masih ada sikap dan semangat diskriminatif terhadap kelompok etnis tertentu seperti dialami etnis Cina pada era-era sebelumnya. Karena itu pula, pembauran antar-etnis dan antar-golongan berbagai komponen bangsa Indonesia hanya akan tercapai apabila didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan warga keturunan etnis Cina sendiri.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Zein Bagi, 2000, *Etnis Cina Dalam Potret Pembauran di Indonesia*, Prestasi Insan Indonesia.
- Budiman, Arief, 1999, "Cina atau Tionghoa", dalam Moch Sa'dum, ed., *Pri-Nonpri: Mencari Format Baru Pembaruan*, Jakarta: CIDES.
- Coppel, Charles A, 1994, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta Pustaka Sinar Harapan.
- Suryadinata, Leo, 2002, *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Supradi Suparlan dkk, 1989, *Interaksi Antar Etnik di Beberapa Propinsi di Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Taher, Tarmizi, 1997, *Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa di Indonesia*, Jakarta PPI.
- Tan, Mely G, 1997, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta Gramedia.
- Tim Peneliti PMB LIPI, 1999, *Pemecahan Masalah Hubungan Antar Etnis: Etnisitas Dan Konflik Sosial*, Jakarta: PMB LIPI.

Widjaya, Hasan, 1997, *Sekitar Pembauran dan Problematiknya*, Solo:  
UD. Mayasari.